BAB III

PT. POS INDONESIA (Persero)

3.1. Profil Perusahaan

PT. POS INDONESIA (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh suatu Direksi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. POS INDONESIA (PERSERO) mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa perposan bagi dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas.

Visi PT. POS INDONESIA (Persero) adalah penyedia jasa pos bernilai tinggi dengan daya saing global.

Misi PT. POS INDONESIA (Persero) adalah :

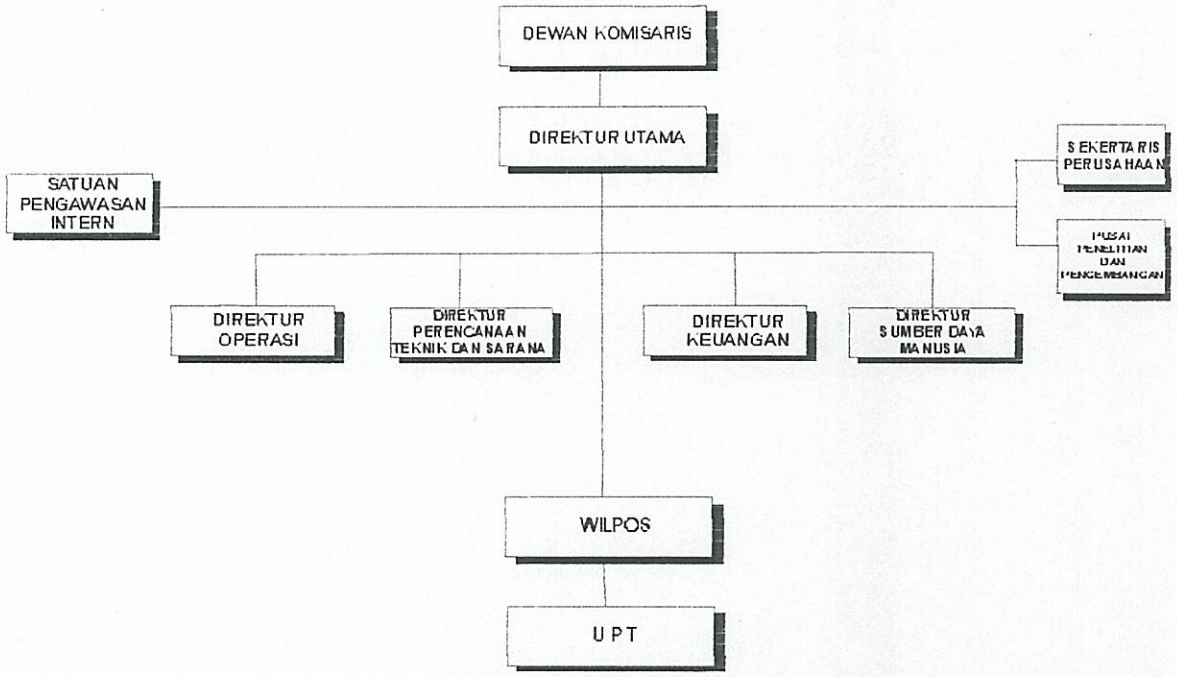
- Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung teknologi tepat guna dan sumber daya manusia profesional.
- Menyediakan layanan komunikasi, logistik, transaksi keuangan dan layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.
- Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat baik di pasar domestik maupun pasar global.
- Memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa.

3.2. Sejarah PT.POS INDONESIA

26 - 8- 1746	Kantorpos pertama di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron
1906	Posts Telegraaf end Telefoon Diensts
27-9–1945	Jawatan PTT Republik Indonesia ditandai oleh Pengambil alihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan Militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel
1961	Berdasarkan Peraturan PemerintahNo.240 Tahun 1961 status jawatan PTT berubah menjadi PerusahaanNegara (PN)Pos dan Telekomunikasi
1965	PN Pos dan Telekomunikasidibagi dua menjadi: PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965
1978	Berdasarkan PeraturanPemerintah No.9Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
20-6-1995	Dasar Hukum : Undang-undangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan PeraturanPemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (LembaranNegara RI Tahun 1995 Nomor 11); Anggran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor117tanggal 20 Juni 1995 tentangPendirian Perusahaan Persero PT. POS INDONESIA,sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor111 tanggal 28 Oktober 1998

3.3. Struktur Organisasi

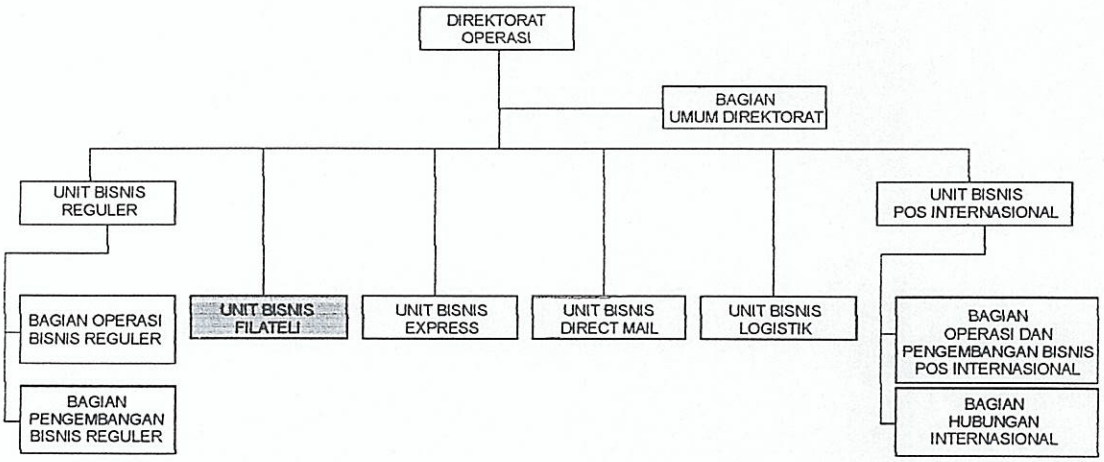
Struktur Organisasi Kantor Pusat



Keterangan :

- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- Organisasi di kantor pusat terdiri dari Direksi, Satuan Pengawas Intern, Sekretariat Perusahaan, Puslitbang
- Direksi terdiri dari satu orang Direktur Utama dan empat orang Direktur.
- Wilpos (Wilayah Usaha Pos) terdiri dari 11 wilayah
- UPT (Unit Pelaksana Teknis) adalah unit yang melakukan pelayanan kepada pelanggan, dalam masyarakat biasa disebut kantor pos.

Struktur Organisasi Direktorat Operasi



3.4. Jenis Layanan

1. LayanannStandar

   Layanan standar terdiri dari Suratpos Tercatat, Suratpos Biasa, Paketpos Biasa, Weselpos, Weselpos Tagih dan Giropos. Weselpos merupakan layanan pengiriman uang melalui sarana dan prasarana pos. Giropos adalah layanan keuangan untuk menampung, menyimpan dan membayar berbagai transaksi baikuntuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan.

2. LayananhCustomized

   Layanan Customized merupakan layanan perlakuan khusus dari weselpos atau giropos yang disebut dengan layanan keagenan / kemitraan. Layanan kemitraan dapat dikelompokkan kembali sesuai dengan jenis layanan yaitu tabungan, penyaluran dana, pembayaran tagihan dan retail (penjualan benda-benda pihak ketiga melalui pos).

3. Layanan Pengembangan

   Pos Indonesia menjadi sentra pembayaran bagi berbagai instansi melalui layanan system on-line payment point. Melalui system on-line payment point, memungkinkan Pos Indonesia bertindak sebagai wakil suatu instansi (sebagai produsen) untuk menerima pembayaran atas suatu jasa yang diberikan (kepada konsumen) oleh instansi tersebut. Dengan fasilitas payment point produsen mendapatkan kemudahan dalam menerima pembayaran/iuran rutin dalam periode tertentu.

4. Layanan Perluasan

   Termasuk dalam layanan perluasan adalah Poserba yaitu merupakan pengembangan fasilitas pelayanan fisik loket kantorpos dengan mengacu kepada konsep "one stop shopping". Poserba hadir untuk melayani tuntas segala kebutuhan tentang pos untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yangdatang. Poserba menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pos dan berbagai alat tulis menulis termasuk kartu ucapan dan benda filateli dalam kemasan khusus.

5. Layanan Prioritas, terdiri dari Suratpos Kilat Khusus, Suratpos Kilat, Paketpos Kilat Khusus, Weselpos Prima, Giropos Prima.

6. Implementasi Marketing Pos 2000

   Untuk operasionalisasi Permodelan Strategi Bisnis PT. POS INDONESIA (Marketing Pos 2000), pada bulan Juli 2001 telah dilakukan penyederhanaan produk berdasarkan kategori tingkat mutu layanan.

7. Bisnis Komunikasi, Filateli dan Logistik

   Berada dalam Direktorat Operasi, yang terdiri dari : Unit Bisnis Reguler, Unit Bisnis Filateli, Unit Bisnis Express, Unit Bisnis Direct Mail, Unit Bisnis Logistik, Unit Bisnis Pos Internasional.